

Abstrak

Dramatisasi dalam dunia sosial politik adalah hal yang lumrah. Interaksi yang dibangun selalu berada dalam dua level dan karakteristik yakni palsu dan asli. Para aktor selalu menampilkan wajah ganda untuk meraih simpati dan suara. Pada panggung depan menampilkan roh dari politik kerakyatan sedangkan di panggung belakang topeng dari politik kerakyatan di buka dan yang terlihat adalah politik kepentingan. Sistem demokrasi di aras lokal tidak mungkin berhasil pada masyarakat yang memelihara feodalisme karena distribusi kekuasaan telah ditentukan sejak awal. Di sisi lain, praktik demokrasi juga tidak berjalan dengan semestinya di tengah masyarakat dengan angka buta hurufnya masih sangat tinggi. Praktik demokrasi yang dijalankan di kabupaten Ende tahun 2013 berada pada dua situasi dan kondisi ini.

Demokrasi yang dibangun dan dibanggakan berada dalam genggamannya kaum oligark. Rakyat tidak menjadi subjek dari seluruh proses demokratisasi. Rakyat hanya menjadi tameng, alat bagi kaum oligark untuk merebut dan melestarikan kekuasaannya. Pilkada sebagai representasi dari semangat demokrasi orang-orang daerah dipancung oleh kekuatan kaum oligark yang memiliki berbagai sumber daya. Pilihan politik rakyat diarahkan, kebutuhan dan kepentingan rakyat dimanipulasi. Kaum oligark di daerah memainkan peran penting bagi sukses tidaknya para kandidat untuk naik tahta. Di samping itu ada upaya yang dilakukan oleh kaum oligark di daerah untuk mereduksi dan memodifikasi praktik demokrasi ke dalam wajah teokrasi. Persoalan ini didalami dengan menggunakan teori dramaturgi sebagai pisau analisis sekaligus kaca pembesar untuk membaca realitas sosial politik yang terjadi di suatu wilayah terpencil dan termiskin, Ende-Flores-NTT.

Kata Kunci: Kabupaten Ende, demokrasi, politik lokal, pilkada, dramaturgi dan kaum oligarki